

**RANCANGAN AWAL**  
**RANCANGAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**(RENJA) TAHUN 2024**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN**  
**DESA KABUPATEN BENGKALIS**



**JL. Pertanian No. 02 Bengkalis**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkalis Tahun 2024 dapat disusun. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Tahun 2021-2026.

Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan dan menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2024.

Bengkalis, Januari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. ISMAIL, MP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680605 198909 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	26
2.4. Review terhadap Ranwal RKPD 2023.....	28
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	38
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	40
3.3. Program dan Kegiatan.....	40
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, serta perencanaan

penyelenggaraan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Bengkalis. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Bengkalis, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Bengkalis dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- 6). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 7). Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
- 8). Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019;
- 9). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
- 10). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 11). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
- 12). Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis;
- 13). Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;

- 14). Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/Bappeda-PPEPD/003/2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Renja**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis;
- 2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis;
- 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Menjaga kesinambungan kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2024.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, Lampiran C5, adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, dengan Renja K/L dan RKPD Kabupaten Bengkalis, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Berisikan tentang tingkat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dan hal kritis yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bengkalis, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bengkalis, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan telaah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional. Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

#### BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah–kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan antara lain :

<b>NO</b>	<b>URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH REALISASI SEBAGAI BERIKUT</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SPKD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SPKD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>2</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH REALISASI SEBAGAI BERIKUT</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
<b>3</b>	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH REALISASI SEBAGAI BERIKUT</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
<b>4</b>	<b>ADMINISTRASI PEGAWAI PERANGKAT DAERAH</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>5</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH REALISASI SEBAGAI BERIKUT</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
<b>6</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH REALISASI SEBAGAI BERIKUT</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>7</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DEARAH</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>8</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>
<b>1</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA</b>
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>
<b>1</b>	<b>FASILITAS KERJA SAMA ANTAR DESA</b>
	<b><i>FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN / KOTA</i></b>
	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
<b>IV</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>
<b>1</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa

	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan,
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>
	<b>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan guna Kelembagaan Lembaga Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel. dan Masyarakat Hukum Adat
	Fasilitasi Penyediaan Sarana & Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat Desa,
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Keluarga,

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu pada APBD tahun 2022 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai rencana walaupun dipertengahan tahun terdapat kebijakan perubahan perencanaan penganggaran dari Pemerintah Daerah karena adanya proyeksi penurunan pendapatan daerah dan program refocussing, namun dapat

diselesaikan pada saat APBD Perubahan untuk beberapa sub kegiatan yang sebelumnya belum diakomodir pada anggaran murni APBD Tahun 2022.

Dari 5 (Lima) program dengan 12 kegiatan, 43 Sub Kegiatan secara umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 100%.

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2022 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan tercapai 95,01% merupakan capaian realisasi keuangan yang cukup optimal (s.d Desember). Capaian indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota pada tahun 2022 sebesar 100% dari target 100%. Capaian Indikator Kinerja Program Penataan Desa pada tahun 2022 sebesar 100% dari target 100%. Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Kerjasama Desa pada tahun 2022 sebesar 100% dari target 100%. Capaian Indikator Kinerja Program Program Administrasi Pemerintahan Desa pada tahun 2022 sebesar 100% dari target 100%. Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat pada tahun 2021 sebesar 88,00% dari target 100%.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2022 disajikan dalam Tabel T-C.29. berikut



**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2022  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TRIWULAN 4**

Sasaran Pembangunan Tahunan :

Hal 2 dari 9

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV						13= 9+10+11+12		14 = 7 + 13
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
	01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			99.794.883.000,00	-	-	15.966.826.200,00	750.828.361,00	1.296.784.903,00	880.199.267,00	4.204.971,593,00	-	7.141.784.154,00	-	7.141.784.154,00	-	7.141.784.154,00	-	7,87				Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	-	0	73.322.000,00	121.466.000,00	51.227.800,00	130.704.630,00	-	356.721.310,00	-	356.721.310,00	-	356.721.310,00	-	-				
	01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja Anggaran yang disusun dengan baik	30 dokumen	936.642.000,00	-	-	5 156.107.000,00	1 73.322.000,00	2 62.193.100,00	0 0,00	2 16.099.800,00	5,00	151.614.900,00	5,00	151.614.900,00	16,67	16,19						
	01.2.01.04.		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang di akomodir	6 dokumen	436.726.000,00	-	-	1 66.121.000,00	0 0,00	0 51.749.900,00	0 4.802.000,00	1 0,00	1,00	56.561.800,00	1,00	56.561.800,00	16,67	13,84						
	01.2.01.05.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang di akomodir	6 dokumen	300.000.000,00	-	-	1 46.136.000,00	0 0,00	0 3.600.000,00	0 0,00	1 26.371.200,00	1,00	29.971.200,00	1,00	29.971.200,00	16,67	9,99						
	01.2.01.06.		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja yang disusun dengan baik	6 dokumen	400.302.000,00	-	-	1 66.717.000,00	0 0,00	0 3.204.000,00	0 27.026.000,00	1 30.740.010,00	1,00	61.690.810,00	1,00	61.690.810,00	16,67	15,41						
	01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja yang di susun setiap tahunnya	6 dokumen	371.407.000,00	-	-	1 61.901.200,00	0 0,00	0 0,00	0 19.389.800,00	1 37.493.600,00	1,00	56.883.400,00	1,00	56.883.400,00	16,67	15,32						

File By: s4CHEV - KABUPATEN BENGKALIS

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.



No.	Saaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangka 1 Daerah Perangka 1				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		(16)
		01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah informasi dan publikasi dalam 1 tahun	25 Orang	1.385.106.000,00	-	-	5 Orang	236.850.000,00	0-	27.150.000,00	0-	70.600.000,00	0-	28.900.000,00	5 Orang	51.500.000,00	5,00	178.150.000,00	5,00	178.150.000,00	20,00	12,86	
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-				0	0,00	0	237.332,000,00	0	13.875,000,00	0	2.184.800,00	-	2.436.007.850,00			-	-	
		01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0 NULL	-	-				0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-			-	-	
		01.2.07.16.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0 NULL	-	-				0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-			-	-	
		01.2.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan prasarana terpenuhi dalam 1 tahun	50 unit	13.580.744.000,00	-	-	17 Dms	2.485.124.000,00	0	0,00	0-	237.332,000,00	0-	13.875,000,00	17 dms	2.184.800,00	17,00	2.436.007.850,00	17,00	2.436.007.850,00	34,00	17,82	
		01.2.06.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-				0	65.653,761,00	0	111.109,855,00	0	95.045,147,00	0	130.593,296,00	-	432.412.961,00			-	-	
		01.2.06.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa tenaga administrasi yang diperlukan untuk melayani surat menyurat; pengalihan surat kantor dalam 1 tahun	3000 surat; 3 orang	600.000.000,00	-	-	3 Orang; 1.000 surat	100.000.000,00	0	20.400.000,00	0	23.770.000,00	0	15.980.000,00	3 Orang; 50 Surat	22.000.000,00	3,00	63.200.000,00	3,00	63.200.000,00	0,30	13,87	
		01.2.06.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 bulan	2.330.952.640,00	-	-	12 bulan	388.475.440,00	3 bulan	60.903,761,00	3 bulan	79.839,825,00	3 bulan	59.865,147,00	3 bulan	86.403,296,00	12,00	288.912.961,00	12,00	288.912.961,00	20,00	12,40	
		01.2.06.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Tidak Tetap dan Jasa Administrasi	15 orang	363.600.000,00	-	-	3 Orang	66.600.000,00	0/0	14.400.000,00	0-	7.500.000,00	0-	19.200.000,00	3 Orang	19.200.000,00	3,00	60.300.000,00	3,00	60.300.000,00	20,00	16,58	
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Tidak Tetap dan Jasa Administrasi	55 unit	1.825.812.000,00	-	-	11 unit	388.152.000,00	2 unit	63.788.000,00	2 unit	53.130.000,00	4 unit	124.383,694,00	3 unit	119.389,299,00	11,00	360.690.993,00	11,00	360.690.993,00	20,00	18,76	

No.	Sasaran RKPD	KODE	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA q/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA q/d tahun 2022		Perangka t Daerah Perang ung			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	13= 9+10+11+12	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	15		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertukaran Kendaran Dinas Operasional atau Layanan	Persentase Penuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan Kantor	45 unit	183.000.000,00	-	-	9 Unit	30.500.000,00	0	0,00	0	0,00	1 unit	3.174.000,00	8 unit	10.803.000,00	9,00	13.977.000,00	9,00	13.977.000,00	20,00	7,64
		01.2.09.08.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah alat/bebanhan yang dibutuhkan jumlah tenaga/bebanhan	445 Item, 35 personil	8.150.888.800,00	-	-	80 Item; 7 personil	1.163.814.800,00	22 Item	74.508.000,00	20 Item	58.088.600,00	25 Item	307.147.200,00	22 Item; 7 Personil	825.186.200,00	89,00	1.134.938.000,00	89,00	1.134.938.000,00	20,00	13,87
		01.2.09.10.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terselenggaranya penataan gedung kantor dalam 1 tahun	60 bulan	1.677.000.000,00	-	-	12 Bulan	338.150.000,00	3 bulan	38.102.000,00	3 bulan	103.705.000,00	3 bulan	43.310.000,00	3 bulan	149.826.000,00	12,00	332.943.000,00	12,00	332.943.000,00	20,00	18,85
		01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6 unit	-	-	-	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (6)</b>											<b>52,66</b>	<b>58,75</b>	<b>26,88</b>	<b>20,48</b>	<b>48,88</b>	<b>58,04</b>	<b>84,82</b>	<b>88,07</b>	<b>84,82</b>	<b>89,28</b>			<b>0,00</b>	<b>58,88</b>
<b>Predikat Kinerja Program</b>											<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Thgff</b>	<b>Budget</b>	<b>Thgff</b>	<b>Thgff</b>			<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		02.	PROGRAM PENATAAN DESA			1.632.928.480,00	-	-		343.181.400,00		9.500.000,00		47.940.000,00		51.770.000,00		231.905.858,00	-	341.115.858,00	-	341.115.858,00	-	28,89
		02.2.01.	Penataan Desa			-	-	-		-	0	9.500.000,00	0	47.940.000,00	0	51.770.000,00	0	231.905.858,00	-	341.115.858,00	-	341.115.858,00	-	-
		02.2.01.01.	Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan, dan Perubahan Status Desa	689 Desa	1.632.928.480,00	-	-	9 Desa	343.181.400,00	0	9.500.000,00	2 desa	47.940.000,00	4 desa	51.770.000,00	3 desa	231.905.858,00	9,00	341.115.858,00	9,00	341.115.858,00	1,31	28,89
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (6)</b>											<b>0,00</b>	<b>2,77</b>	<b>25,00</b>	<b>28,87</b>	<b>85,00</b>	<b>58,08</b>	<b>100,00</b>	<b>87,88</b>	<b>100,00</b>	<b>89,40</b>			<b>1,31</b>	<b>28,89</b>
<b>Predikat Kinerja Program</b>											<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Thgff</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>			<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			1.379.258.000,00	-	-		329.875.000,00		4.999.200,00		85.418.200,00		94.218.800,00		17.204.400,00	-	201.848.600,00	-	201.848.600,00	-	18,28
<b>Predikat Kinerja Program</b>											<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Thgff</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>			<b>Budget</b>	<b>Budget</b>

No.	Sasaran RKPD	KODE	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
		03.2.01.	Facilitasi Kerja sama antar Desa		-	-	-	-	0	4.999.200,00	0	85.418.200,00	0	94.218.800,00	0	17.204.400,00	-	201.849.800,00	201.849.800,00	-	-					
		03.2.01.01.	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	55 BKAD	300.000.000,00	-	-	11 BKAD	50.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	45.332.000,00	11 BKAD	45.332.000,00	11,00	45.332.000,00	20,00	15,11				
		03.2.01.02.	Facilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Jumlah Desa yang melaksanakan kerja sama antar desa dengan pihak ke 3	090 desa	180.000.000,00	-	-	1 Dokumen	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1 Dokumen	27.530.000,00	0	27.530.000,00	1,00	27.530.000,00	0,15	15,29				
		03.2.01.03.	Facilitas Pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Kecamatan yang dipejuri lokasi kawasan perdesaan	15 Lokasi Kawasan Perdesaan	1.499.250.000,00	-	-	1 Dokumen	248.875.000,00	0,00	4.999.200,00	0	85.418.200,00	0	21.356.800,00	1 Dokumen	17.204.400,00	1,00	128.975.800,00	1,00	128.975.800,00	6,67	8,80		
<b>Total Realisasi Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>20,88</b>	<b>15,39</b>	<b>89,07</b>	<b>60,00</b>	<b>61,00</b>	<b>3,30</b>	<b>84,88</b>	<b>78,02</b>			<b>6,67</b>	<b>18,00</b>		
<b>Profil Kinerja Program</b>											<b>Rangai</b>	<b>Rangai</b>	<b>Rangai</b>	<b>Rangai</b>	<b>Thgp</b>	<b>Rangai</b>	<b>Rangai</b>	<b>Rangai</b>	<b>Rangai</b>	<b>Thgp</b>			<b>Rangai</b>	<b>Rangai</b>		
	04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			34.143.729.800,00	-	-	5.618.957.600,00		1.540.826.900,00		1.906.046,74		536.648.300,00		1.384.558,70		5.388.080.644,00	5.388.080.644,00	-	-	15,78	Dasar Pembedaan Masyarakat dan Desa			
		04.2.01.	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						0	1.540.826.900,00	0	1.906.046,74	0	536.648.300,00	0	1.384.558,70		5.388.080.644,00	5.388.080.644,00	-	-					
		04.2.01.01.	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dibalikannya Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa; Raker Aparatur Pemerintah Kecamatan dan koordinasi Bidang Pemerintahan Desa.	100 desa	1.599.533.400,00	-	-	136 Desa (3 kali) ; 11 Kecamatan	34 Desa	57.780.000,00	60 Desa	124.710.000,00	20 Desa	40.220.000,00	22 desa	143.370.000,00	136,00	388.080.000,00	136,00	388.080.000,00	85,00	22,89			

No.	Saasan RKP	KODE	Uraian/ Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangka Daerah Perangka ng				
					6		7			8		9		10		11			12		13= 9+10+11+12			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		04.2.01.04.	fasilitas pengalihan keuangan desa	Jumlah aparatur desa yang diberikan pelatihan pengalihan keuangan desa; jumlah desa yang dilakukannya pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap pengalihan keuangan dan aset desa; jumlah jasa foto	690 desa	8.804.239.800,00	-	-	6	1.487.737.300,00	0	0	426,000,000,00	0-	398,188,000,00	0-	219,850,000,00	136 desa	438,940,000,00	136,00	1.482.999.900,00	136,00	1.482.999.900,00	20,00	16,82		
		04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah kepala desa yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	690 desa	4.858.872.200,00	-	-	6	686.755.700,00	0-	0	596,803,900,00	0-	56,900,000,00	0	0,00	136 desa	27,240,000,00	136,00	686.999.900,00	136,00	686.999.900,00	20,00	14,82		
		04.2.01.06.	fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	terlaksananya pembinaan dalam penyusunan ROP Desa	350 desa	1.217.370.000,00	-	-	1	118.405,000,00	0	0	85,429,000,00	0	2,810,000,00	0	0,00	1	0,00	1,00	85.325.000,00	1,00	85.325.000,00	0,28	7,25		
		04.2.01.07.	evaluasi dan pengarsipan peraturan desa	Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan hukum	690 desa	5.412.258.200,00	-	-	136	902.941.700,00	34 Desa	0	241,220,000,00	35 Desa	246,970,000,00	35 desa	396,070,000,00	32 desa	225,965,200,00	136,00	900.226.200,00	136,00	900.226.200,00	20,00	16,83		
		04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	terdapatnya BUMDesa yang mandiri dan profesional serta berdaya saing tinggi	690 BUMDesa	10.851.484.000,00	-	-	136	1.675.244.000,00	1 BUMDesa</td <td>0</td> <td>105,490,000,00</td> <td>50 BUMDesa</td> <td>987,157,944,00</td> <td>0-</td> <td>60,930,000,00</td> <td>85 BUMDesa</td> <td>342.952,500,00</td> <td>136,00</td> <td>1.496.533.444,00</td> <td>136,00</td> <td>1.496.533.444,00</td> <td>20,00</td> <td>14,89</td> <td></td>	0	105,490,000,00	50 BUMDesa	987,157,944,00	0-	60,930,000,00	85 BUMDesa	342.952,500,00	136,00	1.496.533.444,00	136,00	1.496.533.444,00	20,00	14,89		
		04.2.01.11.	fasilitas penyusunan profil desa	Jumlah Pokja yan dibina untuk mendayagunakan Profil Desa setiap tahunnya	55 krc; 690 desa	1.500.000.000,00	-	-	136	258.800.000,00	35 desa	0	16,698,000,00	40 desa	12,240,800,00	20 desa	13,478,300,00	41 desa	202.950,000,00	136,00	244.957.100,00	136,00	244.957.100,00	247,27	16,33		
		04.2.01.18.	fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan kelurahan yang di evaluasi status perkembangan pemerintahan	775 Desa dan Kelurahan	780.000.000,00	-	-	155	138.800.000,00	19 desa dan kelurahan	0	11,328,000,00	45 desa dan kelurahan	97,040,000,00	10 desa dan kelurahan	6,300,000,00	81 desa dan kelurahan	13,540,000,00	155,00	127.998.800,00	155,00	127.998.800,00	20,00	16,41		
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (6)</b>										<b>58,90</b>	<b>25,40</b>	<b>66,68</b>	<b>28,68</b>	<b>62,58</b>	<b>7,94</b>	<b>109,00</b>	<b>28,02</b>	<b>100,00</b>	<b>84,70</b>			<b>20,00</b>	<b>18,70</b>				
<b>Profil Kinerja Program</b>										<b>Target Realis</b>	<b>Target Realis</b>	<b>Realis</b>	<b>Target Realis</b>	<b>Realis</b>	<b>Target Realis</b>	<b>Target Realis</b>	<b>Target Realis</b>	<b>Target Realis</b>	<b>Target Realis</b>			<b>Target Realis</b>	<b>Target Realis</b>				

No.	Sasaran RKP	KODE	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung				
					6		7			8		9		10		11			12		13= 9+10+11+12			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
		05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		185.952.807.480,00	-	-	26.773.912.900,00		1.131.697,176	0,00	7.638.772,94	2,00	4.425.434,78	0,00	7.216.167,40	8,00	-	28.412.072.306,00	-	28.412.072.306,00	-	19,27		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
		05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pakarnya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	0	1.131.697,176	0,00	7.638.772,94	2,00	4.425.434,78	0,00	7.216.167,40	8,00	-	28.412.072.306,00	-	28.412.072.306,00	-	-					
		05.2.01.01	Identifikasi dan Rehabilitasi masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkulu	Jumlah identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkulu	450.000.000,00	-	-	1	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	55.349.200,00	1,00	55.349.200,00	1,00	55.349.200,00	-	12,38					
		05.2.01.02	Facilitasi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Saku yang Terdapat di Desa/Kelurahan	900.000.000,00	-	-	1	150.000.000,00	0,00	69.812.800,00	0,00	0,00	0,00	1	62.132.800,00	0,00	131.945.600,00	1,00	131.945.600,00	-	14,88					



No.	Sasaran RUPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RUPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RUPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RUPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung						
					6		7			8		9		10		11						12		13 = 9+10+11+12	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%	(16)
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)
		05.2.01.08.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya 10 Program pokok PKK	TP PKK Kab.	12.000.000.000,00	-	-	10	2.300.000.000,00	0,0	348.953,476,00	0,0	959.249,642,00	0,0	255.972,289,00	10	780.907,259,00	10,00	2.255.082.991,00	10,00	2.255.082.991,00	-	15,79			
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (9)</b>											<b>8,22</b>	<b>8,81</b>	<b>26,88</b>	<b>21,68</b>	<b>46,76</b>	<b>17,40</b>	<b>69,69</b>	<b>27,89</b>	<b>100,00</b>	<b>89,34</b>			<b>0,00</b>	<b>16,87</b>			
<b>Prediksi Kinerja Program</b>											<b>Berang</b>	<b>Berang</b>	<b>Berang</b>	<b>Berang</b>	<b>Berang</b>	<b>Berang</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Berang</b>	<b>Berang</b>	<b>Tinggi</b>			<b>Berang</b>	<b>Berang</b>			
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (9)</b>											<b>8,89</b>	<b>11,17</b>	<b>31,94</b>	<b>19,00</b>	<b>61,99</b>	<b>29,89</b>	<b>69,00</b>	<b>35,82</b>	<b>95,79</b>	<b>86,40</b>			<b>18,92</b>	<b>26,79</b>			
<b>Prediksi Kinerja OPD</b>											<b>Berang</b>	<b>Berang</b>	<b>Berang</b>	<b>Berang</b>	<b>Berang</b>	<b>Berang</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Berang</b>	<b>Berang</b>	<b>Tinggi</b>			<b>Berang</b>	<b>Berang</b>			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar bidang serta komitmen yang tinggi agar setiap pelaksanaan program dapat dilaksanakan dengan maksimal																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RUPD berikutnya*):																											

\*) Data oleh Kepala Bappeda

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sampai akhir Desember 2022, semua program/kegiatan yang dilaksanakan **sudah** memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat **berjalan** dengan baik sesuai rencana.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem e-Monev dan SIPD membantu kerja bidang-bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis membutuhkan skil masing-masing aparatur serta adanya keterbatasan Kuantitas pegawai.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Pada tahun 2021 hasil analisis kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan sebagai berikut : Pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Jumlah Desa Status Desa Mandiri Pada tahun 2022 realisasi sebesar 45 Dengan target 50, maka presentase capaian sebesar 94%.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Untuk sasaran strategis yang pertama ini dapat terealisasi dengan baik atau capaiannya 94 % karena kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Seperti persentase Desa Mandiri sudah tercapai 46 Desa Mandiri pada Tahun 2022 di Kabupaten Bengkalis.

Untuk Persentase Pendapatan Asli Desa (PADes) dan bisa tercapai karena didukung dengan adanya :

- a. Sektor Perkebunan
  - b. Sektor Perikanan dan Kelautan
  - c. Sektor Jasa yang telah ditetapkan melalui Perdes
  - d. Pendamping Desa pusat dan pendamping desa Kabupaten Bengkalis yang telah mendampingi desa.
- b. Indikator Kontribusi PADes terhadap APBDes. Analisis pencapaian pada tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022, dengan pencapaian 55% merupakan angka yang realistis dan optimis telah tercapai.

Permasalahan :

- 1) Masih adanya beberapa Desa yang belum ada kontribusi untuk PADes yang ada di desanya.
- 2) Masih lemahnya BUMDesa terhadap peningkatan PADes di desanya.
- 3) Pembinaan BUMDesa terhadap pentingnya PADes.

Solusi

- 1) Melakukan melakukan pembinaan dan langkah-langkah untuk memajukan BUMDesa agar bisa membantu PADes Desa.

- c. Indikator Persentase Bumdesa Aktif. Analisis pencapaian pada tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022, dengan pencapaian 100%, merupakan angka yang realistis dan optimis telah tercapai.

Untuk sasaran strategis yang kedua ini dapat terlaksana atau terealisasi 100% pada indikator jumlah BUMDesa aktif dapat terealisasi Karena sudah terbentuknya BUMDesa di Kabupaten Bengkalis sebanyak 136 unit dapat dilihat dari :

- 1) Adanya keorganisasian/pengelola yang sudah di SK kan oleh Kepala Desa
- 2) Adanya perdes tentang BUMDesa
- 3) Adanya laporan keuangan
- 4) Adanya ada unit usaha yang dibutuhkan

- d. Indikator Persentase PKK Aktif Analisis pencapaian pada tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022, dengan pencapaian 100 %, merupakan angka yang realistis dan optimis telah tercapai.

Untuk sasaran strategis yang ketiga ini dapat teralisasi dengan baik atau capaiannya 100% karena semua kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Adapun untuk indikator persentase Posyandu Aktif telah tercapai target 100% disetiap kecamatan dan desa didukung dengan yaitu :

- 1) Adanya Surat Keputusan (SK) oleh Camat atau Kepala Desa
- 2) Adanya pembinaan dari Dinas terkait hingga dari kecamatan
- 3) Adanya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan
- 4) Adanya honorarium bagi kader posyandu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk posyandu yang berada di desa sedangkan untuk posyandu di Kelurahan bersumber dari dana APBD Kecamatan setiap kecamatan
- 5) Adanya kegiatan dalam bentuk lomba posyandu tingkat kecamatan, Kabupaten dan Nasional
- 6) Terbentuk pokjnal posyandu di Kabupaten

- e. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Analisis pencapaian pada tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022, dengan pencapaian predikat B dengan nilai 100%.

capaian kinerja Tahun 2022 dengan target pembangunan jangka menengah Terealisasi B dengan target mendapat prediket B, dan capaian kinerja 100 %. Diperkirakan target kinerja Tahun 2023 akan dapat tercapai prediket A. Masih terdapat beban kinerja yang akan dipenuhi sampai dengan Tahun 2023 dengan prediket A. Pada Tahun 2023 masih ada kekurangan Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dan menjadi bahan evaluasi kami kedepannya untuk melakukan perbaikan pada laporan SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

Tabel T-C.30.

## Pencapaian kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Bengkulu

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (th n-2)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1.	Jumlah Desa Status Desa Mandiri			50	65	80	95					
2.	Persentase PKK Aktif			100	100	100	100					
3.	Persentase Bumdesa Aktif			100	100	100	100					
4.	Kontribusi PADes terhadap APBDes			0,6	0,7	0,8	0,9					
5.	Nilai Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B					

### 2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan identifikasi permasalahan sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, maka selanjutnya akan dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yaitu :

Tabel 2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Aspek permasalahan	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Isu-isu Strategis
1	bidang Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya kemampuan manajerial aparatur desa dan BPD</li> <li>Kendala dalam penentuan batas desa, tidak tersedianya peta batas desa</li> <li>Masih adanya keterlambatan dan kendala dalam menyampaikan persyaratan pengajuan dana transfer ke desa.</li> <li>Monev yang tidak efisien karena rentang daerah jarak dan waktu</li> </ol>	-	<p><b>Visi :</b> <b>Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera</b></p> <p>Misi : <b>Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian</b></p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b></li> <li><b>Program Penataan Desa</b></li> <li><b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b></li> <li><b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b></li> </ol>	Belum berjalannya pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan.

				<b>5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	
2.	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketimpangan kemampuan antar Bumdes disebabkan tidak meraatanya kualitas SDM</li> <li>2. Entreprenuership masih rendah</li> <li>3. Belum adanya transfer ilmu antar Bumdesa yang berhasil dengan belum berhasil</li> <li>4. Masih rendahnya peran pendamping desa dalam memberikan fungsi pemberdayaan kepada BUMDesa</li> <li>5. Masih kurangnya penggalian potensi desa terhadap pemanfaatan BUMDesa</li> <li>6. Tidak tersedianya produk unggulan desa yang dikelola oleh BUMDesa;</li> <li>7. Kurang maksimalnya memanfaatkan teknologi tepat guna karena belum optimalnya fungsi</li> </ol>			

		Posyantek			
3.	Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sosialisasi kader KPM di masing-masing Desa;</li> <li>2. Rendahnya kapasitas dari KPM desa.</li> <li>3. Masih lemahnya kerjasama antar desa.</li> <li>4. Belum ditetapkannya kawasan perdesaan</li> <li>5. Belum adanya rencana strategis terkait perkembangan pembangunan kawasan perdesaan.</li> </ol>			

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis adalah sebagai unsur pelaksana urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan tugas seperti dijelaskan diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama dan pembangunan kawasan perdesaan.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat beberapa isu- isu strategis berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu tersebut meliputi kondisi Kabupaten Bengkalis pada umumnya yang merupakan salah satu Kabupaten dalam Pemerintah Daerah yang sedang berkembang.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan

RKPD yaitu adanya kegiatan yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan akan diusulkan di APBD Prubahan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :

Tabel T-C.31.

Review terhadap RKPD tahun 2024 Kabupaten Bengkulu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu

No	DATA RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				11.630.400.000						
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				375.000.000						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	285.000.000						
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bengkulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bengkulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	90.000.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bengkulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	150.000.000						

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000						
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bengkalis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	9.798.430.500						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bengkalis	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	175.000.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bengkalis	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	3 Laporan	250.000.000						
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>										
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	200.000.000						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	350.000.000						
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bengkalis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75 paket	150.000.000						

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bengkalis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 paket	300.000.000						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bengkalis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	280.000.000						
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bengkalis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	250.000.000						
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	150.000.000						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.800.000.000						
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 orang	490.000.000						
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										
<b>Pengadaan Mebel</b>	Kab. Bengkalis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	400.000.000						
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bengkalis	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000.000						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bengkalis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	400.000.000						

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bengkulu	Jumlah Sarana dan prasarana terpenuhi dalam 1 tahun	20 unit	550.000.000						
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 surat	150.000.000						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	400.000.000						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 orang	150.000.000						
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bengkulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	650.000.000						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bengkulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	100.000.000						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bengkulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	12 bulan	490.000.000						

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bengkalis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	200.000.000						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bengkalis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	350.000.000						
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>										
	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>										
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis / Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	375.000.000						
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	400.000.000						
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>										
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>										
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	615.294.000						
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	10 dokumen	500.000.000						

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	150.000.000						
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1.800.000.000						
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	550.000.000						
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 laporan	568.000.000						
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	958.000.000						
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1.400.000.000						
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	650.000.000						
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Bengkalis		Laporan	250.000.000						
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	300.000.000						
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	350.000.000						
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	158.000.000						
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Bengkalis	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	650.000.000						

	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	8 Desa	450.000.000						
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	250.000.000						
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	11 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	400.000.000						
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>										
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	11 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	300.000.000						
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	600.000.000						

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bengkalis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	550.000.000						
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	375.000.000						
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	17.229.000.000						
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1.370.000.000						
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	775.000.000						
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	11 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	375.000.000						

	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	2.900.000.000						
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	200.000.000						
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	300.000.000						

## 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Forum Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Umum bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2024. Forum Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (*stakeholder*) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2024.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh *stakeholder* dengan berpedoman kepada matrik RPJMD 2021-2026, tema dan prioritas pembangunan 2024 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPJMD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2024 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPJMD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Perangkat Daerah urusan Urusan Pemerintahan Umum bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis agar lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkalis

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkalis selain mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi, juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis harus merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun berikutnya berdasarkan telaahan terhadap prioritas nasional dalam rancangan awal RKP Tahun 2024.

Diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas nasional di masing-masing provinsi. Susun prioritas pembangunan di daerah sesuai dengan isu serta permasalahan yang dianggap prioritas. Pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan alokasi Dana Perimbangan didalam membangun daerah, perlu juga untuk mencermati pelaksanaan prioritas nasional di daerah serta pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar sinergi dengan program-program prioritas dari K/L untuk mendukung prioritas nasional tersebut. Pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan. Visi, Misi, dan Sasaran dalam RPJM Nasional 2020-2024 adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah 5 tahun yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah pelaksanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Prioritas pembangunan tersebut mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”** dan pencapaian misi ke 1 (satu) yaitu Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan keuangan Daerah, kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, maka tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut : Tujuan ada dua yaitu : 1) Terwujudnya pengelolaan potensi keuangan Daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif. Untuk tujuan tersebut diatas, maka sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 1). Meningkatnya profesionalitas pemerintah desa. 2). Meningkatnya keberdayaan masyarakat. 3). Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis dan kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026). Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021-2026 memuat tujuan, sasaran yang terkait langsung tugas pokok, fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang mengacu kepada Misi kesatu RPJMD Kabupaten Bengkalis yaitu *“Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan*

*kemampuan keuangan Daerah, kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan perekonomian masyarakat”.*

Program dan Kegiatan pada tahun 2024 disusun guna penyesuaian Program dan Kegiatan dalam Renstra PD untuk periode tahun 2021-2026 dan dijadikan bahan awal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Hal ini memperlihatkan adanya sinergitas Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sehingga penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dipublikasi kan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berdasarkan Peemendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang terakhir dilakukan pemutakhiran pemetaan berdasarkan Kepmen Nomor 050-5889 Tahun 2021. Secara garis besar Program dan kegiatan dapat dilihat sebagai beikut :

KODE					
UR US AN / U NS UR	BI DA NG UR US AN / BI DA NG UN SU R	PRO GRA M	KEGI ATAN	SUB KEGI ATAN	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA
2	13	02			Penyelenggaraan Penataan Desa
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
2	13	02	2.01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenanga Kabupaten/Kota
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
2	13				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
8	01	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
8	01	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
8	01	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
8	01	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
8	01	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
8	01	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
8	01	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
8	01	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
8	01	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
8	01	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
8	01	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
8	01	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8	01	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
8	01	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
8	01	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
8	01	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
8	01	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
8	01	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
8	01	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
8	01	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
8	01	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
8	01	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
8	01	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
8	01	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
8	01	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
8	01	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
8	01	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
8	01	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
8	01	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
8	01	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
8	01	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
8	01	05	2.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Wargadan Kelompok Masyarakat
8	01	05	2.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dan hasil review Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;
- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

Secara garis besar rumusan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis /kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 program;
- 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 sebanyak 10 kegiatan;
- 4) Jumlah kebutuhan dana dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 secara total sebesar Rp. 54.706.724.500,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkalis. Program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel T-C-29.



Tabel T-C.29.

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS																
TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025																
Perangkat Daerah		: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS														
KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal Renja Tahun 2024			Pagu Tambahan hasil pembahasan FPD 2024	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana (diisi APBD III/APBD I/APBN)	Catatan Penting (alasan penambahan)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang Penanggung Jawab
U	Bid. U	Prog	Keg	Sub			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
XX	XX	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>											
XX	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
XX	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	5 dokumen	285.000.000			APBD		1 dokumen		
XX	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bengkulu	1 dokumen	100.000.000			APBD		1 dokumen		
XX	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bengkulu	1 dokumen	90.000.000			APBD		1 dokumen		
XX	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bengkulu	1 laporan	150.000.000			APBD		1 dokumen		
XX	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	1 dokumen	100.000.000			APBD		1 dokumen		
XX	XX	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											
XX	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	orang/ bulan	9.798.430.500			APBD				
XX	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Bengkulu	1 Laporan	175.000.000			APBD		1 Laporan		

XX	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD da Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kab. Bengkalis	3 Laporan	250.000.000			APBD		3 Laporan		
XX	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
XX	XX	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>											
XX	XX	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD	1 Dokumen	200.000.000			APBD		Dokumen		
XX	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	dalam dan luar daerah	70 orang	350.000.000			APBD		70 orang		
XX	XX	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											
XX	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMD	75 paket	150.000.000			APBD		75 paket		
XX	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMD	90 paket	300.000.000			APBD		90 paket		
XX	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMD	paket	280.000.000			APBD		paket		
XX	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DPMD	paket	250.000.000			APBD		paket		
XX	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPMD	Dokumen	150.000.000			APBD		Dokumen		
XX	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar daerah/ dalam daerah	Laporan	1.800.000.000			APBD		Laporan		
XX	XX	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD	5 orang	490.000.000			APBD		Dokumen		
XX	XX	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											
XX	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DPMD	25 unit	400.000.000			APBD		5 unit		

XX	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMD	1 unit	200.000.000		APBD	1 unit		
XX	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMD	2 unit	400.000.000		APBD	2 unit		
XX	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana terpenuhi dalam 1 tahun	DPMD	20 unit	550.000.000		APBD	10 unit		
XX	XX	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
XX	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD	1000 surat	150.000.000		APBD	Laporan		
XX	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMD	12 bulan	400.000.000		APBD	Laporan		
XX	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMD	3 orang	150.000.000		APBD	Laporan		
XX	XX	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
XX	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPMD	9 unit	650.000.000		APBD	9 unit		
XX	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMD	9 unit	100.000.000		APBD	9 unit		
XX	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMD	12 bulan	490.000.000		APBD	unit		
XX	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMD	1 unit	200.000.000		APBD	1 unit		
XX	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMD	1 unit	350.000.000		APBD	unit		

Page 3

13				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>													
13	02			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>													
13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa													
13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>													
13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa													
13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	11 Kecamatan	Dokumen	375.000.000			APBD		Dokumen				KELEMBAGAAN
13	03	2.01	02	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Kecamatan	Dokumen	400.000.000			APBD		Dokumen			KELEMBAGAAN
13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>													
13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>													
13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	136 Desa	Dokumen	615.294.000			APBD		Dokumen				PEMDES
13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Bengkalis	10 dokumen	500.000.000			APBD		10 dokumen				PEMDES
13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Bengkalis	Dokumen	150.000.000			APBD		Dokumen				PEMDES
13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Bengkalis	Dokumen	1.800.000.000			APBD		Dokumen				PEMDES
13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Bengkalis	40 Orang	550.000.000			APBD		40 Orang				PEMDES
13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Bengkalis	1 laporan	568.000.000			APBD		1 laporan				PEMDES
13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Bengkalis	Dokumen	958.000.000			APBD		Dokumen				PEMDES
13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Bengkalis	Dokumen	1.400.000.000			APBD		Dokumen				P2M

13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Bengkais	Laporan	650.000.000			APBD	Laporan		PEMDES
13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Kab. Bengkais	Laporan	250.000.000						
13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kab. Bengkais	Dokumen	300.000.000			APBD	Dokumen		PEMDES
13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Bengkais	Dokumen	350.000.000			APBD	Dokumen		PEMDES
13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kab. Bengkais	Dokumen	158.000.000			APBD	Dokumen		PEMDES
13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Bengkais	40 Orang	650.000.000			APBD	40 Orang		PEMDES
13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab. Bengkais	8 Desa	450.000.000			APBD	24 Desa		PEMDES
13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Bengkais	Laporan	250.000.000			APBD	Laporan		PEMDES
13	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa										
13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan	11 Kecamatan	Dokumen	400.000.000			APBD	Dokumen		PEMDES
13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>										
13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										
13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	11 Kecamatan	Dokumen	300.000.000			APBD	Dokumen		KELEMBAGAA

13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bengkulu	Dokumen	600.000.000		APBD	Dokumen	KELEMBAGAA
13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Kecamatan	Lembaga	550.000.000		APBD	Lembaga	KELEMBAGAA
13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bengkulu	Unit	375.000.000		APBD	Unit	KELEMBAGAA
13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Dokumen	17.229.000.000		APBD	Dokumen	P2M
13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Bengkulu	Laporan	1.370.000.000		APBD	Laporan	P2M
13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Bengkulu	Laporan	775.000.000		APBD	Laporan	KELEMBAGAA
13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	11 Kecamatan	Dokumen	375.000.000		APBD	Dokumen	KELEMBAGAA
13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Bengkulu	Dokumen	2.900.000.000		APBD	Dokumen	PKK KABUPATEN

13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	11 Kecamatan	Dokumen	375.000.000			APBD	Dokumen	KELEMBAGAA
13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Bengkalis	Dokumen	2.900.000.000			APBD	Dokumen	PKK KABUPATEN
13	05	2.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kabupaten Bengkalis	keluarga	200.000.000			APBD	keluarga	PKK KABUPATEN
13	05	2.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kabupaten Bengkalis	keluarga	300.000.000			APBD	keluarga	PKK KABUPATEN
				<b>JUMLAH</b>				<b>54.706.724.500</b>					

Page 6

Bengkalis, Januari 2023  
 Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ISMAIL, MP  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680605 198909 1 002

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan 2024.

#### 5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis .

#### 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis, harus

memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

2. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

### 5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan pemberdayaan dan peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang masih memerlukan upaya keras.
3. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerja utama bidang kelembagaan, kerja sama desa dan pambangunan kawasan perdesaan, bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan bidang pemerintahan desa.
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang telah diusulkan dan ditetapkan.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa

mendatang oleh pimpinan dan seluruh jajaran/staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.